

BAB III

POLITIK LUAR NEGERI ERDOGAN DAN KERJA SAMA

PENANGANAN IMIGRAN TURKI & UNI EROPA

Pada bab III ini, penulis akan menjabarkan sedikit mengenai kepemimpinan Erdogan dan sikapnya yang lebih banyak pro kepada Timur Tengah. Kemudian, penulis mulai menjabarkan permasalahan imigran yang ada di Timur Tengah yang dialami oleh beberapa negara di Timur Tengah selain Turki. Ini termasuk penanganan imigran yang ada di Turki. Setelah itu, penulis juga menuliskan sedikit pengungsi yang ada di Uni Eropa sekaligus terciptanya kerja sama Uni Eropa dan Turki dalam penanganan imigran.

A. Sikap Erdogan Terhadap Timur Tengah

Setelah terpilihnya partai AKP (*Justice and Development Party*) Partai Konservatif Islam memenangi pemilu pada tahun 2003, keadaan Turki berubah. Recep Tayyip Erdogan memulai perubahan dengan menjadikan Turki menjadi lebih Islam. Pemimpin-pemimpin Turki terdahulu yang banyak dari mereka adalah dari pihak militer telah merubah Turki dari Kerajaan Ottoman yang merupakan Kerajaan Islam menjadi negara yang sangat sekuler. Pelarangan memakai jilbab bagi wanita muslimah di tempat-tempat umum, hingga pembatasan umur untuk belajar Al-Qur'an adalah suatu peraturan yang ada sejak pemerintahan Mustafa Kemal Atatürk. Saat Recep Tayyip Erdogan terpilih dan menjadi Perdana Menteri di Turki, pelarangan ini dihapus. Akhirnya, sampai sekarang para wanita muslimah Turki leluasa untuk memakai jilbab dalam

menjalankan aktivitas biasa baik di tempat umum maupun saat bekerja. Erdogan juga menggagas pembangunan banyak masjid di Turki, pembatasan iklan dalam minuman keras, dan memberikan ruang meningkatnya ekonomi syariah di Turki (Akşam, 2013).

Timur Tengah telah menempati tempat yang semakin signifikan dalam kerangka kebijakan luar negeri Turki sejak berdirinya Republik. Meskipun ada beberapa perubahan terhadap mengutamakan Timur Tengah pada 1990-an, titik balik dalam hal hubungan Turki-Timur Tengah sebenarnya ada di kebijakan luar negeri rezim AKP. Ketika krisis politik di Timur Tengah, respon Turki dalam posisi penting untuk Timur Tengah dapat dipahami lebih positif. Sementara kemajuan juga bisa dilihat dengan hubungan dengan Iran, Irak dan Suriah. Sementara hubungan dengan Israel justru memburuk.

Turki pada era Erdogan menerapkan politik *zero policy with neighbor* untuk menerapkan kebijakan politiknya di negara-negara sekitarnya. Terutama dalam hal ini adalah negara-negara Timur Tengah yang dahulu pada masa sebelum Erdogan tidak tersentuh. Dalam *website* resminya, Turki menjelaskan :

In this context, we believe that our policy of zero problems with neighbors has gained additional meaning and importance as the Middle East stands at the brink of a historical transformation. We hope that the current dynamic for reform advances in way that will meet the expectations of the people while also contributing to peace and security in the region. If this can be achieved, the spirit of cooperation that we are trying to develop on the basis of our zero problems policy will be further strengthened. We are sparing no effort towards this direction and we will continue to do so. (Policy of Zero Problems with our Neighbors)

Dalam uraiannya, Turki menjelaskan bahwa kebijakan *zero problem with neighbor* telah memperoleh arti tambahan dan penting sebagai Timur Tengah dalam ambang transformasi sejarah. Turki mengharapkan bahwa dinamika saat ini reformasi kemajuan dengan cara yang akan memenuhi harapan rakyat sementara juga berkontribusi terhadap perdamaian dan keamanan di wilayah tersebut.

Dalam buku Ahmet Davutoglu yang menjabat sebagai Perdana Menteri dari tahun 2014 yang berjudul *Strategic Depth: Turkey's International Position (Stratejik Derinlik: Türkiye'nin Uluslararası Konumu)*, ia mengkonfirmasi pergeseran poros politik luar negeri Turki dengan menekankan sebagai “pembenahan” politik luar negeri Turki dari yang sebelumnya berafiliasi dan mengisolasi diri dari segala bentuk afiliasi politik dengan negara-negara tetangganya menjadi politik luar negeri yang mengutamakan idealisme dengan latar belakang sisi budaya dan historis Turki yang memiliki kesamaan dalam kawasan regional timur tengah dan kaukasia.

Sebagai negara Muslim pertama yang diakui Israel, Israel telah menjadi pemasok utama senjata ke Turki. Militer, strategis, dan diplomatik kerja sama antara kedua negara maju di kawasan ini. Namun, hubungan dengan Israel justru memasuki tahap yang sedang tidak begitu baik. Ini dimulai dengan kunjungan ke Turki dari pemimpin Hamas pada tahun 2006, meningkat dengan sebutan "Satu Menit". Ini terjadi saat Erdogan memarahi Presiden Shimon Peres selama pertemuan tahunan Forum

Ekonomi Dunia di Davos pada bulan Januari 2009 atas penyerangan Palestina, dan dilanjutkan dengan kejadian penyerangan pada Mavi Marmara dari Gaza Freedom Flotilla pada Mei 2010. (Foreign Policy of the Turkish Republic, 2011).

Sejak Erdogan menjabat sebagai Perdana Menteri, ia sudah aktif dalam membela kemerdekaan Palestina dan menyalahkan Israel. Erdogan menyebut dukungan bagi Palestina merdeka bukanlah sebuah pilihan, melainkan kewajiban. Pidato Erdogan di Mesir pada 2011 tiga hari setelah massa merusak kantor kedutaan besar Israel di Kairo menyerukan untuk segera mungkin mengibarkan bendera Palestina di Timur Tengah, sebagai simbol perdamaian. Tak hanya itu, dalam pidatonya Erdogan juga menyinggung lagi insiden berdarah terhadap bantuan kemanusiaan lewat kapal Mavi Marmara yang terjadi tahun 2010 lalu. Penyerbuan yang dilakukan tentara Israel saat itu atas Mavi Marmara menyebabkan sembilan aktivis Turki tewas. Erdogan menyebut Israel tidak bertanggungjawab dan melanggar hukum internasional dengan menyerang konvoi, yang hanya membawa bahan pangan dan mainan anak-anak. Erdogan juga menyatakan Israel harus membayar tindakan mereka (Budiman, 2011). Erdogan menyerukan mengecam masyarakat internasional yang diam dengan keadaan Palestina masih berlangsung operasi militer dengan Israel (Turkish PM Erdoğan hits out at Egypt for ‘silence’ over Palestine, 2014).

Tindakan Erdogan yang mendukung Palestina dan mengecam Israel ini akan memperburuk hubungan Ankara dengan Washington.

Israel, Jerman dan Amerika adalah tiga negara yang menentang rencana Palestina meminta pengakuan merdeka dari PBB. Mereka menganggap rencana itu justru akan merusak upaya perundingan damai. Namun, sikap itu mendapat kritikan dari Turki. Perdana Menteri Erdogan menilai Amerika sebagai sekutu dekat Israel telah menunjukkan prasangka usang dalam soal Palestina. Charles Kupchan, seorang think tank anggota Dewan Hubungan Luar Negeri di International Politics menilai, Erdogan dengan partai konservatif AKP yang sedang berkuasa di Turki ingin mengambil peran lebih besar di dunia Islam. Erdogan pada tahun 2011 melakukan tur di kawasan Arab. Setelah Mesir, Perdana Menteri Turki itu juga mengunjungi Tunisia dan Libya (Budiman, 2011).

Hubungan dengan Iran membaik dalam rangka keterlibatan ulang dengan dunia Muslim di wilayah tersebut. Kolaborasi energi bergerak di luar pembelian dan transportasi gas alam Iran melalui Turki untuk pengembangan bidang hidrokarbon Iran oleh perusahaan Turki. Selain itu, dalam sengketa nuklir Iran Turki, bersama dengan Brasil, memediasiantara AS dan Iran. Mereka telah mendorong sesama anggota Dewan Keamanan PBB untuk mencapai kesepakatan dengan Iran atas program nuklirnya, dalam upaya terakhir untuk memblokir suara sanksi terhadap Teheran.

Hubungan Turki dengan Irak telah membaik ke sebuah periode baru setelah invasi ke Irak. Selama waktu itu, integritas Irak dan mencegah munculnya sebuah negara Kurdi merdeka di Irak utara yang prioritas Turki. Dengan daya dorong Davutoglu dalam membuka kebijakan luar negeri, Turki diakui Pemerintah Daerah Kurdistan (KRG) sebagai unit

federal di Irak dan Davutoglu bertemu Barzani. Baru-baru ini, konsulat Turki di Erbil dibuka oleh Erdogan pada 31 Maret 2011. Hubungan Suriah-Turki juga telah mengalami perubahan. Permasalahan air dan dukungan Suriah untuk PKK (Partai Pekerja Kurdistan) yang utama masalah berpotensi meledak antara kedua negara pada akhir 1990-an (membawa mereka ke ambang perang atas penangkapan pada tahun 1998 dari pemimpin PKK Abdullah Ocalan) berubah ke arah yang positif.

Penolakan Parlemen Turki untuk bekerja sama militer dengan AS dalam invasi ke Irak adalah titik balik dalam hubungan bilateral Suriah-Turki sejak persepsi Suriah dari Turki diubah. Turki adalah mediator antara Suriah dan Israel pada tahun 2008, selama pembicaraan Golan *Heights*. Walaupun pada tahun 2011 Turki mengecam Bashar Al Assad karena tidak mau mereformasi negaranya. Kerjasama politik dan ekonomi tumbuh kuat dengan negara Islam di Timur Tengah juga membaik. Bahkan, pada tahun 2009, turis persyaratan visa pada turis bahkan timbal balik terangkat (Foreign Policy of the Turkish Republic, 2011).

B. Penanganan Imigran di Turki

Permasalahan awal dari adanya pengungsi adalah karena terjadinya konflik internal yang terjadi di wilayah Timur Tengah. Mulanya hal ini dialami oleh Tunisia yang ingin merobohkan kekuasaan otoriter pemerintah Ben Ali yang sudah menjabat selama 23 tahun. Mulanya, hanya Tunisia yang berkonflik pada tahun 2010. Akhirnya, konflik ini juga meluas terjadi di negara-negara Timur Tengah lainnya. (Sari A. K., 2015, p. 1). Pada tahun 2011, perang Suriah untuk menggulingkan

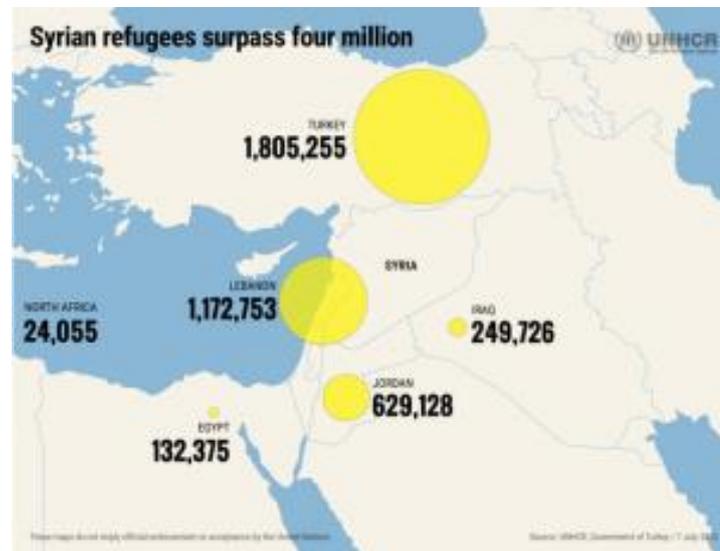
pemerintah otoriter Bashar Al-Assad pecah. Isu yang berkembang konflik ini terjadi antara Sunni Syiah. Namun, semakin lama permasalahan di dalamnya menjadi semakin kompleks dan melibatkan banyak aktor.

Dampaknya, penduduk sipil menjadi korban perang yang belum jelas kapan mereda. Banyak dari mereka yang memutuskan untuk keluar dari negaranya. Penduduk sipil Suriah mau tak mau harus mengungsi ke negara lain karena di Suriah tidak ada daerah yang disepakati sebagai *safe zone* dan *non-fly zone* oleh pihak yang saling bertikai. Awalnya mereka mengungsi ke negara-negara terdekat yang memang berbatasan langsung dengan Suriah. Pilihan yang ada adalah Turki di sebelah utara, Libanon di sebelah barat, Mesir lewat jalur laut dari sebelah barat, Israel dan Yordania di sebelah selatan, kemudian Irak di sebelah Tenggara. Bagi para pengungsi korban perang ini, migrasi ke arah tenggara kecuali di daerah yang dikuasai etnik Kurdi jelas tidak memungkinkan karena daerah Irak sama-sama sedang berkonflik. Dengan demikian, pilihan yang mungkin akan diambil oleh para pengungsi ini keluar dari negara mereka adalah hanya Turki, Libanon, Mesir, dan Yordania. Negara-negara lain di Timur Tengah, tidak mudah ditempuh oleh mereka yang mengungsi dari peperangan lewat jalan darat yang mungkin mereka lakukan. Jalur lain yang biasa dipakai para pengungsi dari Suriah adalah biasanya lewat bandara Damaskus untuk terbang ke Turki (Nugraha, 2015).

Kebanyakan pengungsi melarikan diri ke Turki karena perlakuan Turki yang disebut lebih baik dari negara lainnya di sekitar Suriah. Turki disebut sangat terbuka pada para pengungsi karena kebijakan *Open Door*

Policy yang dicetuskan oleh Erdogan. Kebijakan ini disebut tidak dimiliki oleh negara lain di sekitar Suriah seperti Israel, Kuwait, dan Arab Saudi (Nugraha, 2015).

Gambar 3.1
Peta Pengungsi di Negara Sekitar Syria berdasar rilis UNHCR per 9 Juli 2015



(Sumber : <https://dipanugraha.org/2015/09/06/perang-di-suriyah-dan-kisah-para-pengungsi/>)

Turki dipilih para pengungsi Suriah karena mereka juga mempunyai peluang untuk ‘menerobos’ ke Eropa. Di Eropa para pengungsi ini berharap nantinya mendapatkan status *asylum*. Negara-negara seperti Oman, Kuwait, Qatar memiliki masalah serius dengan komposisi penduduk yang selama ini sudah berjejal dengan para pekerja asing dari negara Asia Selatan dan ini berimbas pada kebijakan *asylum* yang sangat ketat (Nugraha, 2015).

Sejak Oktober 2013, jumlah pengungsi Suriah telah meningkat dan sekarang hampir dua juta pengungsi yang terdaftar di Turki. Turki merupakan penerima pengungsi terbanyak dibandingkan dengan negara-negara yang lain (Armandhanu, 2015). Sejumlah besar pengungsi Suriah yang awalnya lari ke Turki, melanjutkan perjalanannya ke Jerman. Sebagian meninggalkan keluarga mereka di Turki, dan berharap akan bisa

mendatangkan mereka jika sudah menemukan tempat tinggal yang aman (ml/as, 2015).

Gambar 3.2

Pemandangan dari ‘kota’ Oncupinar Container di Kilis, Turki



(Sumber : <https://dipanugraha.org/2015/09/06/perang-di-suriyah-dan-kisah-para-pengungsi/>)

Pemerintah Turki berada di sisi yang kontra terhadap kepemimpinan Bashar Al-Assad setelah sebelumnya gagal menyakinkan presiden Suriah untuk memikirkan pembaharuan menghadapi krisis. Turki akhirnya juga masuk dalam “Group of Friends of the Syrian People” yakni diplomatik internasional negara yang kolektif dan badan-badan mengadakan pertemuan berkala pada topik Suriah di luar Dewan Keamanan PBB (Persatuan Bangsa-Bangsa) menanggapi veto Rusia dan Cina pada resolusi Dewan Keamanan kontra Suriah. Mereka mencoba untuk memberikan solusi untuk Suriah. Turki membantu para sipil Suriah dengan menyambut para pengungsi dari Suriah dan memberikan bantuan kemanusiaan (Ahmadoun, 2014).

Sejak April 2011 Turki pertama kalinya memberlakukan *unconditional* “Open Door Policy” terhadap warga sipil Suriah yang melarikan diri dari konflik. Pada awal konflik, pengungsi Suriah dianggap tamu daripada pengungsi legal, namun sejak akhir Oktober 2011 Turki memberikan status proteksi “sementara”. Ini untuk memberikan kepastian agar tidak ada pengembalian paksa dan tidak ada batasan waktu tinggal untuk para pengungsi di Turki. Pada bulan April 2014, Undang-Undang migrasi baru mulai berlaku memberikan mereka “status pengungsi bersyarat” atau suaka sementara, di bawah Direktorat Jenderal yang baru dibentuk oleh Manajemen Migrasi (GDMM). Sekitar 220.000 orang tinggal di 22 kamp yang kondisinya baik, termasuk 13 kota tempat tinggal dan dua kontainer yang terletak di sepuluh provinsi selatan dan tenggara Turki : Adiyaman, Adana, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaras, Kilis, Malatya, Mardin, Osmaniye dan Sanliurfa. Beberapa 630.000 pengungsi yang terdaftar AFAD dan Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR) namun tidak berada di kamp, dan sekitar 500.000 pengungsi tetap tidak terdaftar (Ahmadoun, 2014).

Sementara kondisi kamp yang dikelola oleh AFAD bekerja sama dengan UNHCR dan badan-badan PBB lainnya sangat baik. Sedangkan sejumlah besar pengungsi yang tinggal di luar kamp-kamp (juga disebut “pengungsi urban”) lebih rentan, karena kebanyakan dari mereka tidak mendapatkan keuntungan dari layanan yang diberikan oleh pemerintah Turki atau lembaga internasional, kecuali perawatan kesehatan. Di bawah keputusan pemerintah Januari 2013, semua pengungsi Suriah bisa

mendapatkan keuntungan dari perawatan kesehatan dasar gratis (Ahmadoun, 2014). Dalam gambar 3.2 terlihat pemandangan dari 'kota' Oncupinar Kontainer di Kilis, Turki, yang dilengkapi dengan fasilitas sosial, sekolah, tempat pelatihan, layanan kesehatan, dan pusat olahraga. Ada 14 ribu pengungsi Suriah yang tinggal di sana (Nugraha, 2015).

Diikuti pada April 2014, Turki mempunyai *Law on Foreigner and International Protection*, Di Undang-Undang ini disebutkan bahwa Turki sudah mengatur mengenai perlindungan terhadap orang asing, asylum ataupun pengungsi. Perlindungan ini bisa dilihat pada *Section Four* Ketentuan lain pada Perlindungan Sementara dan Perlindungan Internasional, Pasal 91 menyebutkan bahwa :

(1) Temporary protection may be provided for foreigners who have been forced to leave their country, cannot return to the country that they have left, and have arrived at or crossed the borders of Turkey in a mass influx situation seeking immediate and temporary protection.

(2)The actions to be carried out for the reception of such foreigners into Turkey; their stay in Turkey and rights and obligations; their exit from Turkey; measures to be taken to prevent mass influxes; cooperation and coordination among national and international institutions and organisations; determination of the duties and mandate of the central and provincial institutions and organisations shall be stipulated in a Directive to be issued by the Council of Ministers. (Turkey M. o., 2014)

Disebutkan bahwa pada ayat 1, perlindungan sementara dapat diberikan untuk orang asing yang telah dipaksa untuk meninggalkan negara mereka, tidak dapat kembali ke negara yang mereka telah meninggalkan, dan telah tiba di atau melintasi perbatasan Turki dalam situasi masuknya massa mencari perlindungan segera dan sementara. Dan pada ayat 2, disebutkan

bahwa tindakan yang harus dilakukan untuk penerimaan asing tersebut ke Turki adalah tinggalnya mereka di Turki dan hak dan kewajiban; keluarnya dari Turki; langkah-langkah yang harus diambil untuk mencegah arus massa; kerjasama dan koordinasi antar lembaga dan organisasi nasional dan internasional; penentuan tugas dan mandat dari lembaga dan organisasi pusat dan provinsi ditetapkan dalam Instruksi yang dikeluarkan oleh Dewan Menteri.

Seperti banyak pemerintah lain, Ankara mengasumsikan bahwa rezim Assad akan segera runtuh dan pengungsi akan kembali ke Suriah dengan cepat. Namun, pada pertengahan 2014 Turki telah menghabiskan sekitar \$ 4 miliar bantuan kemanusiaan untuk Suriah, dan tak ada tanda bahwa kedatangan pengungsi akan mereda. Akibatnya, Turki baru-baru ini membuat pengakuan Suriah di perlintasan perbatasan resmi tergantung pada ketersediaan tempat dalam kamp, atau pada keadaan kemanusiaan tertentu (misalnya jika pengobatan medis darurat diperlukan). Hal ini juga ditutup sementara penyeberangan perbatasan seperti yang dekat dengan Kobanê / Ayn al-Arab (Ahmadoun, 2014).

C. Penanganan Imigran di Negara Timur Tengah yang Lain

Konflik Suriah yang berlangsung sampai sekarang menyebabkan warga sipil berhamburan keluar dari negaranya untuk mengungsi. Tak hanya di Turki, negara-negara Timur Tengah yang lain juga menjadi tujuan para pengungsi. Di Yordania, ada 75.000 pengungsi yang terlantar di kamp pengungsi al-Rukban. Kamp pengungsi tersebut berada di wilayah gurun sepanjang perbatasan timur laut Yordania dengan Suriah.

Namun, Raja Yordania Abdullah II menolak membuka pintu perbatasan Rukban karena khawatir para ekstremis akan masuk bersama dengan pengungsi. Walau dengan semua kesulitan, Yordania akan membantu para pengungsi. Tapi dengan catatan tidak mempertaruhkan nyawa warga Yordania dan keselamatan mereka. *Amnesty International* menampilkan tayangan dari satelit yang menunjukkan kamp-kamp pengungsi di perbatasan. Yordania menyatakan perbatasan Rukban adalah “zona militer tertutup” sejak Juni lalu setelah pengebom bunuh diri dari ISIS menewaskan tujuh tentara di kamp pengungsi yang menampung lebih dari 100 ribu warga Suriah. Dalam tayangan satelit yang diterima Amnesty dari lembaga dewan suku yang mengurus kehidupan para pengungsi di Rukban, terlihat jelas pekuburan tempat pengungsi dimakamkan (Nugraha, 2015).

Sedangkan di Libanon ada 1 juta pengungsi dari Suriah di tahun 2015 yang tinggal di antara populasi warga Libanon yang lebih dari 4 juta. Libanon saat ini memiliki konsentrasi tertinggi per kapita pengungsi di dunia. Secara ekonomi, Libanon telah menderita kerugian perdagangan, pariwisata dan investasi. layanan publik dan infrastruktur rapuh bahkan sebelum krisis, dan sekarang di bawah tekanan berat sebagai akibat dari masuknya pengungsi. Keamanan negara sedang diuji sebagai konflik di Suriah tumpahan seberang perbatasan, pengungsi memenuhi daerah di Aarsal, utara Bekaa, selama kuartal terakhir 2014.

Pengungsi tinggal di lebih dari 1.700 daerah di Libanon dan kebanyakan tinggal di daerah yang miskin di Libanon. Di beberapa tempat,

pengungsi melebihi jumlah penduduk setempat. Ada sekitar 5 juta pengungsi Suriah dan 270.000 pengungsi Palestina di Lebanon (diperkirakan 45.000 dari mereka dari Suriah) pada akhir tahun 2015. Pengungsi didominasi perempuan dan anak-anak yakni sekitar 80 persen dari total populasi pengungsi, dan sekitar setengah dari seluruh rumah tangga pengungsi merawat orang dengan kebutuhan khusus.

WFP (*World Food Programme*) telah menyediakan 72 persen dari semua pengungsi dengan bantuan pangan bulanan. Pada 2015, WFP mengurangi nilai voucher makanan 40 persen karena kekurangan dana. Untuk pengungsi, kondisi tempat tinggal tetap sangat miskin. 33 persen dari pengungsi yang diwawancarai awal ini klaim tahun itu kondisi akomodasi mereka masih belum diterima, terutama yang berkaitan dengan kondisi atap. Beberapa 59 persen dari pengungsi menyewa apartemen. Di antara mereka, 45 persen tidak punya pilihan selain untuk berbagi kecil, penginapan dasar dengan keluarga pengungsi lainnya dalam kondisi penuh sesak. Ini adalah satu-satunya cara bagi mereka untuk membayar sewa. Sisanya 39 persen tinggal di akomodasi rapuh dan tidak aman, termasuk tenda-tenda di permukiman informal dan jenis-jenis tempat penampungan sub-standar seperti garasi, kerja-situs gudang, dan bangunan yang belum selesai. tempat penampungan ini sering terkena angin, hujan dan salju, dan kurangnya sanitasi yang tepat. Agen sering terkendala dalam apa yang bisa mereka lakukan untuk memperbaiki tempat penampungan (UNHCR, 2015).

Sekitar 135.000 warga Suriah telah terdaftar di Badan Pengungsi PBB (UNHCR) di Mesir. Perkiraan oleh UNHCR dan organisasi kemanusiaan lainnya menunjukkan bahwa populasi pengungsi Suriah di negara itu bisa menjadi dua kali angka itu. gejolak politik Mesir, bersama dengan kebijakan nasional yang menghambat pekerjaan organisasi kemanusiaan, telah meninggalkan pengungsi Suriah di sana dengan sedikit visibilitas atau bantuan luar masyarakat di mana mereka tinggal. lebih banyak perhatian internasional harus diarahkan ini populasi terpinggirkan. Mesir sudah telah berfungsi sistem di tempat untuk membantu pengungsi. Tapi sistem-sistem memerlukan dukungan tambahan dari donor, pemerintah nasional, dan Mesir sendiri jika mereka ingin memenuhi kebutuhan dasar orang-orang yang telah melarikan diri ke sana.

Awalnya, para pengungsi Suriah yang tiba di Mesir disambut hangat. Hubungan sejarah antara kedua negara telah menciptakan rasa solidaritas antara Suriah dan Mesir. organisasi bantuan Mesir baru bermunculan untuk menawarkan bantuan kepada para pengungsi, dan secara umum ada tingkat tinggi kepedulian terhadap kesejahteraan para pendatang baru. Salah satu orang di Kairo mengatakan dengan revolusi mereka sendiri masih segar dalam pikiran mereka. Pengungsi Suriah bukanlah yang pertama bagi Mesir. Selama dua dekade sebelum kedatangan mereka, negara host puluhan ribu pengungsi, sebagian besar dari Irak dan Tanduk Afrika. PBB, LSM internasional dan lokal, dan jasa pemerintah sudah berjuang untuk memenuhi kebutuhan para pengungsi ini.

Pemerintah mantan Presiden Mohammed Morsi dipandang sebagai bersimpati pada nasib melarikan diri Suriah. Tapi seperti popularitas Morsi memudar, beberapa orang Mesir mulai melihat pengungsi Suriah sebagai pendukung - atau bahkan agen - Ikhwanul Muslimin. Setelah pemerintah yang didukung militer dipasang di Juli 2013, pihak berwenang Mesir memutuskan untuk menangani masuknya pengungsi Suriah sebagai isu keamanan nasional, dan mereka mulai membutuhkan Suriah untuk memiliki visa dan izin keamanan sebelum memasuki negara itu. Ketika Mesir menempatkan langkah-langkah ini ke tempatnya, secara efektif menutup pintu untuk melarikan diri Suriah. Sejak saat itu, pendaftaran pengungsi sudah di negara itu terus, tapi aliran pendatang baru dari Suriah telah hampir berhenti. Sementara Mesir memiliki hak untuk mengelola perbatasan, menolak masuk ke pengungsi bertentangan dengan prinsip-prinsip Konvensi Pengungsi 1951, yang merupakan penandatanganan. Sebagai demonstrasi solidaritas lanjutan dengan Suriah dan dengan negara tuan mereka lainnya, Mesir harus mengangkat pembatasan entri yang mencegah Suriah dari melarikan diri dan memfasilitasi pendaftaran status negara-lebar hukum.

Mendaftar dengan UNHCR dan menerima status hukum di Mesir keduanya menantang bagi pengungsi Suriah. Awalnya, pendaftaran berlangsung hanya di Kairo, dan banyak pengungsi harus melakukan perjalanan beberapa jam untuk membuat diri mereka dikenal UNHCR. Menanggapi masalah ini, UNHCR menyiapkan unit pendaftaran seluler di daerah di mana sejumlah besar pengungsi Suriah hidup. Ini telah

memperbaiki situasi, meskipun RI mendengar banyak warga Suriah yang enggan mendaftar karena mereka khawatir bahwa informasi pribadi mereka akan diberikan kepada rezim di Damaskus, menempatkan mereka pada risiko yang harus mereka pernah memutuskan untuk kembali. Proses melamar dan memperbaharui izin tinggal dengan otoritas Mesir juga lambat dan kompleks. RI diberitahu bahwa secara teratur mengambil tiga atau empat bulan untuk mendapatkan izin itu hanya berlaku untuk enam bulan, yang berarti bahwa pengungsi diwajibkan untuk terlibat dalam proses aplikasi non-stop (Grisgraber, 2014).

Sejumlah perbatasan tidak resmi di sekitar Yordania juga ditutup sejak Mei 2013. Para pejabat Yordania menyatakan negara itu telah mencapai batas dalam menampung pengungsi. Yordania kini menampung 632.228 pengungsi Suriah, yang sangat memberikan dampak terhadap sektor infrastruktur dan ekonomi negara itu, menurut juru bicara UNHCR, Melissa Fleming. Belakangan, jumlah pengungsi yang mencoba memasuki Yordania terus berkurang hingga kurang dari 50 pengungsi per hari. (Sari A. P., 2015).

Situasi di Irak utara adalah cerita yang berbeda. Di sini, para pengungsi terpaksa meninggalkan rumah mereka dengan perang di Suriah secara perlahan membangun kembali kehidupan mereka. Dari 250.000 pengungsi Suriah di Kurdistan Irak, hampir 120.000 tinggal di kota-kota seperti Dohuk dan Erbil, sementara sisanya tinggal di 10 kamp yang tersebar di seluruh wilayah. Lebih dari 45.000 pengungsi Suriah hidup di Domiz camp, dekat dengan kota Dohuk di perbatasan Suriah-Irak. Ini

adalah salah satu kamp pertama yang dibangun setelah masuknya awal Suriah ke Irak pada tahun 2012. Ratusan tenda garis jalan-jalan, beberapa di antaranya dikonversi menjadi struktur perumahan yang lebih permanen sebagai prospek resolusi politik di Suriah tumbuh suram. Tidak seperti kamp didirikan di Turki dan Lebanon, di mana banyak pengungsi berjuang untuk makan, tetap hangat selama musim dingin yang keras dan mendidik anak-anak mereka, Suriah di Irak Kurdistan mengatakan mereka telah menemukan tempat tinggal yang relatif stabil.

Seperti Domiz, Kawergosk adalah kota lain dari tenda, kamp yang terletak di dekat ibukota Kurdi dari Erbil didirikan pada bulan Agustus 2013. Jalan-jalan batu besar dalam garis kamp jalan ke kakus, air mancur dan sekolah kecil minum yang didirikan oleh badan-badan PBB, serta Stasiun di mana berbagai LSM mengeluarkan persediaan seperti selimut dan makanan. KRG telah memberikan banyak pengungsi yang tinggal di kamp-kamp izin yang memungkinkan mereka untuk melakukan perjalanan dan bekerja dalam provinsi utara.

Banyak pengungsi juga telah memulai bisnis mereka sendiri dalam kamp, dari toko-toko tukang cukur ke toko-toko sepatu dan restoran. Ini menciptakan ekonomi lingkaran, juru bicara UNHCR Liene Veide mengatakan mereka yang bekerja di luar kamp menghabiskan uang mereka pada bisnis lokal dalam. Hal ini memungkinkan para pengungsi cara yang mungkin untuk mendapatkan kembali kemandirian dan keberlanjutan, untuk mendapatkan uang dan membawanya kembali ke keluarga mereka.

Sebagian besar pengungsi Suriah yang tinggal di Irak adalah orang Kurdi, dan banyak dari mereka berasal dari provinsi Suriah timur laut Qamishli. Banyak pengungsi mengatakan mereka menghadapi perjalanan melelahkan ke Kurdistan, dan mereka mengerti mengapa orang lain memilih untuk tetap tinggal di Suriah. Bagi banyak pengungsi Kurdi, yang hidup di bawah Presiden Suriah Bashar al-Assad selama perang adalah jerami terakhir dari kehidupan penuh dengan diskriminasi dan kesulitan karena etnis mereka. Umm Mohammad dan suaminya menceritakan bagaimana mereka dan orang lain dalam komunitas mereka tidak diizinkan untuk berbicara bahasa Kurdi di depan umum atau di sekolah-sekolah, mencatat banyak di masyarakat tidak diberikan kewarganegaraan Suriah dan dianggap "asing" oleh pemerintah.

Tidak sampai setelah perang dimulai bahwa Bashar Al-Assad mulai memberikan banyak dari mereka di kewarganegaraan komunitas pengungsi. Ahmad Hussein pemimpin masjid di kamp pengungsi Domiz dan lulusan Universitas Damaskus, melarikan diri setelah dipanggil untuk melayani di tentara. "Situasi sebelum perang itu sulit bagi orang Kurdi. Tanah itu disita dari kami oleh pemerintah dan pekerjaan yang sulit untuk mengamankan. Mereka bahkan tidak diperbolehkan untuk memberikan anak-anak kita nama Kurdi atau kita akan diinterogasi oleh pemerintah. Mengingat situasi yang relatif stabil Suriah telah ditemukan di Kurdistan Irak, ia datang sebagai kejutan kecil bahwa banyak pengungsi tidak ingin kembali ke rumah mereka (Al-Arian, 2014).

D. Kerja Sama Turki – Uni Eropa dalam Penanganan Imigran

Pengungsi yang masuk ke Uni Eropa melalui Negara Italia, Yunani, dan Malta karena paling mudah dicapai dengan perahu. Negara-negara tersebut menjadi pintu masuk bagi pengungsi menuju negara kaya di Eropa seperti Jerman, Inggris, dan Prancis (Sari A. K., 2015). Sebagian besar pengungsi Suriah nekat mengarungi lautan dengan kondisi keras. Mereka menempuh perjalanan singkat, tetapi sangat berbahaya. Dari negara Turki pengungsi pergi ke pulau-pulau di bagian timur Yunani. Mereka berlayar dengan menaiki perahu-perahu kecil yang rapuh dan kelebihan penumpang. (Ali, 2015)

Gambar 3.3

Grafis rute pengungsi Syria menuju Uni Eropa



(Sumber : <https://dipanugraha.org/2015/09/06/perang-di-suriah-dan-kisah-para-pengungsi/>)

Dalam menangani masalah pengungsi, Uni Eropa semenjak tahun 2011 membentuk sebuah badan penanganan pengungsi yang disebut EASO (*European Asylum Support Office*). EASO ini dibentuk karena Uni

Eropa memandang bahwa permasalahan pengungsi dari Mediterania Selatan merupakan masalah regional Eropa bukan hanya masalah satu, atau dua negara Eropa saja (Sari A. K., 2015).

Tugas EASO adalah memberikan solusi terhadap ketidak merataan jumlah pengungsi di setiap negara Eropa. EASO bekerjasama dengan negara asal dan negara ketiga untuk merelokasi pengungsi. Hal ini dilakukan supaya pengungsi mendapatkan penanganan yang tepat. Selain itu juga permasalahan finansial negara penerima menjadikan alasan dilakukannya relokasi pengungsi (Sari A. K., 2015).

Data yang dihimpun dari Komisi Tinggi PBB untuk Urusan Pengungsi (UNHCR / *United Nations High Commissioner for Refugees*), di tahun 2014 pengungsi yang menuju ke Uni Eropa sebanyak 280.000 orang. Pada pada Oktober 2015, UNHCR mencatat 218.394 orang menyeberang dengan 10.006 orang di antaranya mendarat di Yunani pada 20 Oktober 2015 (SAJU, 2015). Selama 2015 menurut laporan UNHCR lebih dari satu juta pengungsi dan migran masuk ke Eropa lewat laut (Maryati, 2015).

Kondisi para pengungsi yang masuk Yunani lewat jalur laut ini bisa dibbilang tidak begitu baik. Perahu yang panjangnya hanya sekitar 20 meter membawa sekitar 500 hingga 700 penumpang (Tekanan atas pemimpin Eropa terkait pengungsi perahu, 2015). Keadaan yang tidak layak ini menyebabkan banyak pengungsi yang berlayar meninggal di tengah perjalanan. Kebanyakan yang meninggal tahun 2015 karena menempuh perjalanan laut yang lama dan berbahaya menuju Italia.

Tidak seperti di Turki, kedatangan para pengungsi Mediterania Selatan di Uni Eropa mendapatkan bermacam-macam tanggapan dari negara-negara Uni Eropa. Negara-negara Uni Eropa tersebut memiliki peraturan yang berbeda mengenai pengungsi yang berbeda. Sehingga perlakuan dan cara penerimaan para pengungsi di setiap negara Uni Eropa itupun berbeda. Kedatangan pengungsi ini ternyata memberikan dampak negatif bagi negara-negara Uni Eropa yang dituju oleh para pengungsi. Terutama negara-negara Uni Eropa yang berada di kawasan pantai yang lebih mudah dicapai pengungsi (Sari A. K., 2015).

Dampak secara ekonomi contohnya terjadi di Yunani yang berbatasan langsung dengan laut Mediterania. Yunani harus menanggung beban atas adanya para pengungsi di negaranya. Pemerintah Yunani tidak mampu memenuhi kebutuhan para pengungsi yang paling mendasar, seperti tempat tinggal, makanan dan minuman serta perlindungan (Sari A. K., 2015). Kebijakan “buruk” juga diserukan pemerintah Hungaria untuk membangun tembok sepanjang 175 kilometer dan 3,9 meter yang bertujuan sebagai penghalang para pengungsi memakai jalur Serbia-Hungaria sebelum menuju ke negara Eropa yang makmur seperti Jerman dan Perancis. Menteri Luar Negeri Hungaria menyatakan bahwa keberadaan para pengungsi memberikan dampak kurang baik bagi perekonomian dan keamanan di negaranya. Hungaria bersikeras bahwa mereka berhak menjaga negaranya dari potensi ketidakstabilan domestik (Nugraha, 2015).

Sementara itu pada Agustus 2015 pihak berwenang Austria menemukan mayat pengungsi didalam sebuah truk yang diabaikan di pinggir jalan bebas hambatan. Polisi menyatakan pengungsi yang meninggal di truk mungkin saja mencapai 50 mayat. Kanselir Austria Walter Faymann menjelaskan bahwa tragedi ini memperlihatkan betapa pentingnya meyelamatkan hidup dan memerangi para penjahat dan penyelundup manusia. Mayat-mayat yang ditemukan itu diketahui sudah berada di sana beberapa saat dan sebagian mulai membusuk .

Selain itu, aksi saling tuduh antar politisi di masing-masing negara Uni Eropa dalam menangani pengungsi juga terjadi (Rencana aksi Uni Eropa soal pengungsi dipertanyakan, 2015). Ketua Parlemen Eropa Martin Schulz mengkritik politik pengungsi yang dijalankan di Eropa selama ini. Schulz menilai yang terjadi tidak sesuai dengan Perjanjian Dublin II dalam Uni Eropa berlaku peraturan bahwa negara yang menjadi tujuan pengungsi juga bertanggung jawab untuk proses suaknya (Renata Permadi, 2012). Dia menyoroti mengenai Italia yang dibiarkan mengatasi pengungsi sendirian. Dia berpendapat bahwa para pengungsi harus dibagikan secara adil ke negara anggota Uni Eropa, tidak hanya ditampung oleh Italia yang akan semakin kewalahan dan menuntut kontribusi Jerman. Anggota Parlemen Eropa Manfred Weber dari CSU (*Christian Social Union*) juga menuntut kontribusi lebih besar dari Jerman. Ia menjelaskan karena Presiden Jerman sudah menuntut solidaritas yang lebih besar dari Eropa, jadi Jerman harus menerima lebih banyak pengungsi (as/ml, 2015).

Aturan Dublin, yang menyebut negara dimana pengungsi masuk untuk pertama kalinya yang harus menangani, kini tidak lagi berfungsi. Italia, Yunani, Hongaria menjadi bukti paling nyata, bahwa aturan Uni Eropa terkait pengungsi itu tidak sesuai lagi dengan zaman. Jika pengungsi memohon suaka di Jerman, Austria atau Swedia, negara anggota lain tidak mau peduli. Masalah yang terjadi sebenarnya tidak ada yang siap menghadapi arus pengungsi se deras itu, juga Jerman atau Austria tidak siap. Sejak bertahun-tahun kapasitas penampungan pengungsi sudah dikurangi drastis. Pemerintah Jerman juga hanya memiliki segelintir aparat yang dapat memutuskan menerima atau menolak permohonan suaka. Dari markas pusat Uni Eropa di Brussel juga tidak memberikan banyak solusi. Komisi Uni Eropa ibaratnya baru bangun setelah reses musim panas yang mengajukan 10 rancangan tindakan, yang hingga kini belum ditanggapi negara anggota. Jika para menteri dalam negeri Uni Eropa tidak dapat menarik keputusan bersama secepatnya menyangkut krisis pengungsi, jangan heran jika perhimpunan ini akan kembali ke zaman dimana masih berdiri tembok dan pagar pembatas. Artinya, inilah situasi darurat politik bagi proyek persatuan Eropa (Riegert, *Krisis Pengungsi: Eropa Terancam Darurat Politik*, 2015).

Ketua Parlemen Eropa Martin Schulz mengeritik kelambatan anggota Uni Eropa menerima pengungsi. Schulz mengatakan tidak bisa menerima kalau ada negara anggota mengatakan mereka tidak punya tempat karena ini adalah masalah bersama Uni Eropa bersama (hp/ab,

2013). Tidak bisa dipungkiri bahwa Uni Eropa sedang menghadapi krisis pengungsi yang disebut Eropa paling berat pasca perang dunia.

Pada tanggal 25 Agustus 2015, Uni Eropa mengadakan KTT di Wina, Austria. Agenda yang dibahas salah satunya mengenai pengembangan kerja sama antara negara-negara Balkan Barat (Albania, Bosnia dan Herzegovina, Kosovo, Montenegro, mantan Yugoslavia Republik Makedonia, Serbia) dalam menghadapi tantangan migrasi, kerjasama regional dan dialog agama anti-ekstremisme (Koresponden, 2015).

Dalam KTT di Wina tersebut, Negara kawasan Balkan, Serbia dan Masedonia, meminta Uni Eropa membuat rencana aksi untuk mengatasi arus pengungsi menuju Eropa yang melewati wilayah mereka. Ini terkait dengan pengungsi yang terus memasuki wilayah Austria yang ditempuh lewat jalur Laut Tengah yang semakin meningkat. Sementara itu pengungsi juga menuju Balkan menuju ke Jerman.

Dalam KTT tersebut Uni Eropa menyatakan akan menganggarkan 1,5 juta euro untuk membantu Makedonia dan Serbia. Tetapi Menlu Serbia, Ivica Dacic, mengatakan uang tidak akan menyelesaikan masalah dan meminta Uni Eropa memasukkan mereka dalam rencana pencegahan. Jerman mengatakan bersiap didatangi oleh 800.000 pencari suaka di negara mereka yang jauh lebih besar ketimbang negara anggota Uni Eropa lain. Mereka menyatakan akan memberi akomodasi dan memperlakukan mereka secara adil. Namun, peristiwa mencengangkan terjadi pada tanggal 27 Agustus, dimana pihak keamanan Austria menemukan truk

yang berisi setidaknya 50 mayat pengungsi. Peristiwa ini menunjukkan Uni Eropa yang benar-benar sedang dilanda krisis pengungsi. Peristiwa ini juga menunjukkan betapa daruratnya keselamatan nyawa para pengungsi (Rencana aksi Uni Eropa soal pengungsi dipertanyakan, 2015).

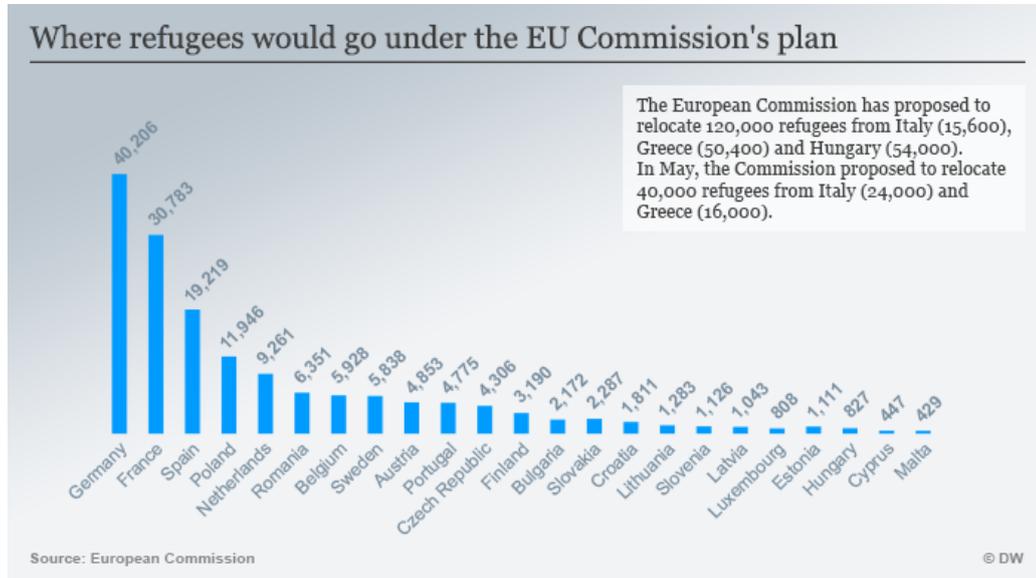
Pada 22 September menteri-menteri kehakiman dan menteri-menteri dalam negeri Uni Eropa bertemu. Di pertemuan tersebut, Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Federica Mogherini mendesak agar negara-negara Uni Eropa berhenti bertengkar mengenai cara menampung ribuan pencari suaka daerah berkonflik atau yang sedang didera perang. Selanjutnya, esok harinya para pemimpin Uni Eropa mengadakan pertemuan dengan pembicaraan dalam kedua pertemuan itu terpusat pada aliran migran (Pejabat Uni Eropa Serukan Persatuan untuk Atasi Krisis Pengungsi, 2015). Selain itu dalam sidang darurat para kepala negara dan pemerintahan Uni Eropa dibahas mengenai sanksi terhadap 19 negara pelanggar aturan suaka. Negara-negara tersebut antara lain Jerman, Austria, Italia dan Hongaria. Mereka dituding tidak mengimplementasikan prosedur permohonan suaka. Padahal Jerman, Ceko, Hongaria dan Austria merupakan penampung terbanyak pengungsi dan mereka adalah negara transit pertama yang kewalahan menerima gelombang pengungsi yang ingin masuk Eropa. Kebanyakan para pengungsi mengajukan permohonan suaknya di tiga negara Eropa ini. Sementara jajaran petinggi Uni Eropa nyaris tidak peduli terhadap krisis pengungsi. Akibatnya sejumlah negara terpaksa memasang pagar kawat berduri untuk menutup perbatasannya.

Politik buka-tutup pintu perbatasan dan kontrol ketat di perbatasan negara juga jadi hal yang lazim di hari-hari belakangan (as/ml, 2015).

Sanksi 19 negara itu sebenarnya merujuk pada penyepakatan sistem kuota penampungan pengungsi (lihat di gambar 3.5). Dibahas bahwa 19 negara tersebut tidak mengimplementasikan kesepakatan yang sudah ada dan akan dikenakan sanksi pada saat KTT Maret 2016. Dalam rencana itu sebanyak 120.000 pengungsi akan didistribusikan secara paksa ke seluruh negara anggota berdasarkan kuota yang disepakati mayoritas anggota Uni Eropa Rencana sistem kuota penampungan pengungsi mendapatkan penolakan dari empat anggota. Penolakan terutama datang dari empat negara di kawasan timur Eropa, yakni dari Hongaria, Rumania, Slowakia dan Republik Ceko. Keempat negara tersebut merasa didikte oleh Uni Eropa untuk menerima keputusan yang dianggap “tidak bagus”. Milan Chovanec menteri dalam negeri Republik Ceko dalam pesan twitternya mengatakan bahwa kesepakatan kuota pengungsi adalah isyarat politik kosong. Dalam keadaan ini Kanselir Jerman Angela Merkel menuntut politik pengungsi bersama dari Uni Eropa yang berlaku untuk seluruh anggota. Kanselir Jerman juga menuntut penyebaran penampungan pengungsi dengan lebih adil dan merata di seluruh anggota Uni Eropa. (as/ml, 2015).

Gambar 3.5

Rencana pendistribusian 120.000 pengungsi oleh Uni Eropa



(Sumber : <http://www.dw.com/id/kontroversi-kuota-pengungsi-memas-jelang-ktt-eropa/a-18731294>)

Pada Jumat 19 Februari setelah berlangsungnya hari pertama Konferensi Tingkat Tinggi KTT Uni Eropa di Brussels, Presiden Dewan Uni Eropa Donald Tusk mengumumkan rencana pertemuan khusus dengan pemerintahan di Ankara untuk mengatasi gelombang migrasi besar-besaran yang melanda Eropa. Sistem relokasi berbasis kuota pengungsi yang ditujukan untuk mengurangi tekanan pada negara-negara garis depan, seperti Italia dan Yunani terbukti tidak efektif, dimana negara-negara bekas Uni Soviet menolak menerima pelaksanaan rencana Uni Eropa. Ketua Komisi Eropa Jean-Claude Juncker mengatakan, kerjasama dengan Turki sangatlah penting untuk dapat mengatasi gelombang migrasi yang telah menyebabkan krisis politik di Uni Eropa. Juncker juga menyebut

bahwa ini adalah alternatif yang cerdas (ap/hp, 2016). Rencana kerja sama dengan Turki ini disambut baik oleh banyak pihak.

Deklarasi penanganan imigran yang dihadiri oleh Perdana Menteri Turki Ahmet Davutoglu di Brussel mengumumkan hasil rancangannya pada pertemuan puncak 7 Maret 2016. 28 pemimpin negara itu akan meminta pemerintah Davutoglu untuk menerima “skala besar” deportasi migran dari Yunani yang merupakan titik masuk utama ke Eropa, dan menerapkan kesepakatan dalam memperlambat aliran pengungsi. Sementara itu di satu sisi, sikap kanselir Jerman Merkel mengkritik kesemrawutan di negara itu dalam menangani pengungsi dan keterlambatannya dalam membangun akomodasi pengungsi. Di sisi lain, dia menyerukan solidaritas dengan pemerintahan di Athena dan menjanjikan dukungan Uni Eropa. Komisi Uni Eropa telah menganggarkan dana sebesar 700 juta Euro untuk bantuan darurat. Merkel mengkhawatirkan akan terjadinya destabilisasi ekonomi kembali di Yunani. Namun, tidak seperti dengan Hungaria tahun lalu, Merkel menolak untuk menerima pengungsi yang saat ini terdampar di perbatasan Yunani-Makedonia. Pemerintah Jerman mengatakan, tujuan utama Berlin adalah menghentikan arus pengungsi yang ingin masuk ke Jerman melalui rute utara. Merkel juga menuduh Austria dan negara-negara Balkan memperuncing krisis dengan menutup perbatasan mereka sendiri-sendiri, dan bersama-sama bertanggung jawab atas kekacauan di Yunani. Kritik ini cukup keras dilontarkan, meskipun faktanya, hingga tahun 2015 Austria masih dianggap sebagai salah satu sekutu dekat Merkel (ap/as, 2016).

Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah Perdana Menteri Turki Ahmet Davutoglu bersedia memenuhi keinginan Eropa, meliputi diperketatnya penjagaan bagi arus pengungsi di perbatasan-perbatasan Turki dan mengambil tindakan terhadap penyelundupan manusia. Eropa sudah menjanjikan kompensasi sebesar 3 miliar Euro pada pemerintah di Ankara. Namun Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, mengejek angka janji bantuan Uni Eropa ini, yang disebutnya terlalu rendah. Seperti diketahui Erdogan jauh lebih berkuasa dibanding Davutoglu dalam menentukan kebijakan politik. Negosiasi Uni Eropa juga bergerak maju dan Presiden Turki diundang untuk KTT Uni Eropa. Akhirnya, Turki menyorongkan tuntutan yang paling penting, yakni pengajuan bebas visa perjalanan ke Eropa secepatnya pada awal Oktober ini. Kesepakatan itu akan menjadi ujian bagi Uni Eropa. Secara politik, sulit untuk menerima politik perang Turki terhadap kaum Kurdi dan peran ambivalennya dalam perang di Suriah. Akan sulit menjajarkan demokrasi Eropa dengan tindakan represif Erdogan terhadap pers yang kritis. Presiden Parlemen Eropa Martin Schulz telah mengatakan penutupan media anti-pemerintah menunjukkan bahwa “Turki mempertaruhkan kesempatan bersejarah bagi proses pemulihan hubungan dengan Eropa”. Schultz juga menyebutkan, tetap “tak ada diskon” bagi Turki ketika masuk dalam isu yang berkaitan dengan nilai-nilai dasar dan universal. Namun, perwakilan dari Ankara senang hati dapat menunjukkan bahwa negara mereka memiliki peran penting dalam solusi krisis di Eropa. Erdogan juga mengatakan bahwa arus migran bisa digerakkan lagi setiap saat, jika Uni

Eropa tidak memenuhi semua tuntutan Turki. Dengan sinyal-sinyal yang dilontarkan Turki, harapan kerjasama dalam kebijakan pengungsi terlihat masih dipertanyakan, bahkan sebelum pertemuan penting di Brussel ini dimulai (ap/as, 2016).

Namun, pada 20 Maret 2016, Uni Eropa dan Turki akhirnya mencapai kesepakatannya. Dalam website www.consilium.europa.eu disebutkan bahwa :

In order to break the business model of the smugglers and to offer migrants an alternative to putting their lives at risk, the EU and Turkey today decided to end the irregular migration from Turkey to the EU. In order to achieve this goal, they agreed on the following additional action points:

1) All new irregular migrants crossing from Turkey into Greek islands as from 20 March 2016 will be returned to Turkey. This will take place in full accordance with EU and international law, thus excluding any kind of collective expulsion. All migrants will be protected in accordance with the relevant international standards and in respect of the principle of non-refoulement. It will be a temporary and extraordinary measure which is necessary to end the human suffering and restore public order. Migrants arriving in the Greek islands will be duly registered and any application for asylum will be processed individually by the Greek authorities in accordance with the Asylum Procedures Directive, in cooperation with UNHCR. Migrants not applying for asylum or whose application has been found unfounded or inadmissible in accordance with the said directive will be returned to Turkey. Turkey and Greece, assisted by EU institutions and agencies, will take the necessary steps and agree any necessary bilateral arrangements, including the presence of Turkish officials on Greek islands and Greek officials in Turkey as from 20 March 2016, to ensure liaison and thereby facilitate the smooth functioning of these arrangements. The costs of the return operations of irregular migrants will be covered by the EU.

2) For every Syrian being returned to Turkey from Greek islands, another Syrian will be resettled from Turkey to the EU taking into account the UN Vulnerability Criteria. A mechanism will be established, with the assistance of the Commission, EU agencies and other Member States, as well as the UNHCR, to ensure that this principle will be implemented as from the same day the returns start.

Priority will be given to migrants who have not previously entered or tried to enter the EU irregularly. On the EU side, resettlement under this mechanism will take place, in the first instance, by honouring the commitments taken by Member States in the conclusions of Representatives of the Governments of Member States meeting within the Council on 20 July 2015, of which 18.000 places for resettlement remain. Any further need for resettlement will be carried out through a similar voluntary arrangement up to a limit of an additional 54.000 persons. The Members of the European Council welcome the Commission's intention to propose an amendment to the relocation decision of 22 September 2015 to allow for any resettlement commitment undertaken in the framework of this arrangement to be offset from non-allocated places under the decision. Should these arrangements not meet the objective of ending the irregular migration and the number of returns come close to the numbers provided for above, this mechanism will be reviewed. Should the number of returns exceed the numbers provided for above, this mechanism will be discontinued.

3) Turkey will take any necessary measures to prevent new sea or land routes for illegal migration opening from Turkey to the EU, and will cooperate with neighbouring states as well as the EU to this effect.

4) Once irregular crossings between Turkey and the EU are ending or at least have been substantially and sustainably reduced, a Voluntary Humanitarian Admission Scheme will be activated. EU Member States will contribute on a voluntary basis to this scheme.

5) The fulfilment of the visa liberalisation roadmap will be accelerated vis-à-vis all participating Member States with a view to lifting the visa requirements for Turkish citizens at the latest by the end of June 2016, provided that all benchmarks have been met. To this end Turkey will take the necessary steps to fulfil the remaining requirements to allow the Commission to make, following the required assessment of compliance with the benchmarks, an appropriate proposal by the end of April on the basis of which the European Parliament and the Council can make a final decision.

6) The EU, in close cooperation with Turkey, will further speed up the disbursement of the initially allocated 3 billion euros under the Facility for Refugees in Turkey and ensure funding of further projects for persons under temporary protection identified with swift input from Turkey before the end of March. A first list of concrete projects for refugees, notably in the field of health, education, infrastructure, food and other living costs, that can be swiftly financed from the Facility, will be jointly identified within a week. Once these resources are about to be used to the full, and provided the above commitments

are met, the EU will mobilise additional funding for the Facility of an additional 3 billion euro up to the end of 2018.

7) The EU and Turkey welcomed the ongoing work on the upgrading of the Customs Union.

8) The EU and Turkey reconfirmed their commitment to re-energise the accession process as set out in their joint statement of 29 November 2015. They welcomed the opening of Chapter 17 on 14 December 2015 and decided, as a next step, to open Chapter 33 during the Netherlands presidency. They welcomed that the Commission will put forward a proposal to this effect in April. Preparatory work for the opening of other Chapters will continue at an accelerated pace without prejudice to Member States' positions in accordance with the existing rules.

9) The EU and its Member States will work with Turkey in any joint endeavour to improve humanitarian conditions inside Syria, in particular in certain areas near the Turkish border which would allow for the local population and refugees to live in areas which will be more safe.

- 1) Semua migran gelap baru yang menyeberang dari Turki ke pulau-pulau Yunani sejak 20 Maret 2016 akan dikembalikan ke Turki. Ini akan berlangsung dengan berkoordinasi Uni Eropa dan hukum internasional, sehingga tidak termasuk jenis pengusiran kolektif. Semua migran akan dilindungi sesuai dengan standar internasional yang relevan dan berkaitan dengan prinsip *non-refoulement*. Ini akan menjadi langkah sementara dan tidak biasa yang diperlukan untuk mengakhiri penderitaan manusia dan memulihkan ketertiban umum. Migran yang tiba di pulau-pulau Yunani akan sepatutnya didaftar dan aplikasi suaka akan diproses secara individual oleh otoritas Yunani sesuai dengan *Asylum Prosedur Directive*, bekerjasama dengan UNHCR. Bagi migran yang tidak mengajukan permohonan suaka atau yang aplikasi telah ditemukan tidak berdasar atau tidak dapat diterima sesuai dengan

direktif akan dikembalikan ke Turki. Turki dan Yunani, dibantu oleh lembaga dan lembaga Uni Eropa, akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan dan setuju setiap pengaturan bilateral yang diperlukan, termasuk kehadiran para pejabat Turki di pulau-pulau Yunani dan pejabat Yunani di Turki dari 20 Maret 2016, untuk memastikan penghubung dan dengan demikian memfasilitasi kelancaran fungsi pengaturan ini. Biaya operasi pengembalian migran gelap akan ditanggung oleh Uni Eropa.

- 2) Untuk setiap pengungsi Suriah kembali ke Turki dari Yunani, pengungsi Suriah lain akan dipindahkan dari Turki ke Uni Eropa dengan mempertimbangkan *Vulnerability Criteria* PBB. Sebuah mekanisme akan dibentuk, dengan bantuan dari Komisi, lembaga Uni Eropa dan negara-negara anggota lainnya, serta UNHCR, untuk memastikan bahwa prinsip ini akan dilaksanakan sejak hari yang sama kembali mulai. Prioritas akan diberikan kepada para migran yang sebelumnya tidak masuk atau mencoba memasuki Uni Eropa tidak teratur. Di sisi Uni Eropa, mekanisme resettlement ini akan berlangsung untuk pertama kalinya dengan menghormati komitmen yang diambil oleh negara-negara anggota dalam kesimpulan Perwakilan Rakyat Pemerintah pertemuan negara-negara anggota dalam Dewan pada tanggal 20 Juli 2015, yang 18.000 tempat untuk pemukiman tetap. Kebutuhan lebih lanjut untuk resettlement akan dilakukan melalui serupa pengaturan sukarela hingga batas tambahan 54.000 orang. Para Anggota Dewan Eropa menyambut niat Komisi

untuk mengusulkan amandemen keputusan relokasi 22 September 2015 untuk memungkinkan untuk setiap komitmen pemukiman kembali yang dilakukan dalam rangka pengaturan ini harus diimbangi dari tempat non-dialokasikan di bawah keputusan. Jika pengaturan ini tidak memenuhi tujuan mengakhiri migrasi tidak teratur dan jumlah pengembalian datang dengan jumlah yang disediakan untuk di atas, mekanisme ini akan ditinjau. Jika jumlah pengembalian melebihi angka yang disediakan untuk di atas, mekanisme ini akan dihentikan.

- 3) Turki akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah rute baru laut maupun darat oleh migrasi ilegal dari Turki ke Uni Eropa, dan akan bekerja sama dengan negara-negara tetangga serta Uni Eropa untuk hal ini.
- 4) Satu kali penyeberangan tidak teratur antara Turki dan Uni Eropa berakhir atau paling tidak telah secara substansial dan berkelanjutan berkurang, Skema Pendaftaran Kemanusiaan Sukarela akan diaktifkan. Negara anggota Uni Eropa akan memberikan kontribusi secara sukarela untuk skema ini.
- 5) Pemenuhan visa liberalisasi roadmap akan dipercepat vis-à-vis semua Negara Anggota yang berpartisipasi dengan maksud untuk mengangkat persyaratan visa bagi warga negara Turki paling lambat akhir Juni 2016, asalkan semua kondisi telah dipenuhi. Untuk tujuan ini Turki akan mengambil langkah yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan yang tersisa untuk memungkinkan Komisi untuk membuat,

berikut penilaian yang diperlukan sesuai dengan kondisi proposal yang sesuai pada akhir April agar Parlemen Eropa dan Dewan dapat membuat keputusan akhir

- 6) Uni Eropa dalam kerjasama yang erat dengan Turki, akan lebih mempercepat pencairan alokasi € 3 Milyar di bawah Fasilitas untuk Pengungsi di Turki dan memastikan pendanaan proyek lebih lanjut untuk orang di bawah perlindungan sementara diidentifikasi dengan masukan cepat dari Turki sebelum akhir Maret. Sebuah daftar pertama dari proyek untuk pengungsi, terutama di bidang kesehatan, pendidikan, infrastruktur, makanan dan biaya hidup lainnya, yang dapat dengan cepat dibiayai dari fasilitas ini, akan bersama-sama diidentifikasi dalam waktu seminggu. Sekali sumber daya ini digunakan sampai penuh, dan memberikan komitmen atas terpenuhi, Uni Eropa akan memobilisasi dana tambahan untuk Fasilitas dari tambahan € 3Milyar sampai dengan akhir 2018.
- 7) Uni Eropa dan Turki menyambut pekerjaan yang sedang berlangsung pada peningkatan Uni Bea Cukai.
- 8) Uni Eropa dan Turki menegaskan kembali komitmen mereka untuk re-negosiasi proses akses sebagaimana ditetapkan dalam pernyataan bersama mereka pada 29 November 2015. Uni Eropa menyambut pembukaan Bab 17 pada tanggal 14 Desember 2015 dan memutuskan, sebagai langkah berikutnya, untuk membuka Bab 33 selama kepresidenan Belanda. Komisi akan mengajukan proposal untuk ini pada bulan April. pekerjaan persiapan untuk pembukaan Bab lainnya

akan terus dengan kecepatan dipercepat tanpa mengurangi posisi Negara Anggota sesuai dengan aturan yang ada.

- 9) Uni Eropa dan negara-negara anggota akan bekerja dengan Turki dalam upaya bersama untuk memperbaiki kondisi kemanusiaan di dalam wilayah Suriah, khususnya di daerah-daerah tertentu di dekat perbatasan Turki yang akan memungkinkan bagi penduduk lokal dan pengungsi untuk tinggal di daerah yang akan lebih aman .

(Relations, 2016)